

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan topik yang semakin menarik untuk dijadikan bahan diskusi, baik oleh kalangan akademisi maupun politisi. Khusus mengenai demokrasi di Indonesia, topik tersebut akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat, baik yang ada didalam negeri maupun diluar negeri. Hal ini terjadi karena orang menaruh harapan sangat besar akan terjadinya masa transisi menuju kehidupan politik yang lebih baik di Indonesia.<sup>1</sup>

Demokrasi adalah sistem yang dianut oleh Bangsa Indonesia dalam menjalankan sistem politik dan kenegaraan. Demokrasi di tiap-tiap negara di dunia ini mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, yang mana antara satu negara dengan negara lainnya mempunyai perbedaan didalam menjalankan demokrasi tersebut, dan di Indonesia demokrasi ini dilaksanakan sesuai dengan ideologi yang dianut Bangsa Indonesia, yakni Demokrasi Pancasila.

Walaupun di tiap-tiap Negara berbeda dalam menjalankan demokrasi tersebut dan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, namun menurut para ahli ilmu politik

---

<sup>1</sup> Afan Gaffar, "Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999) hal. 2

harus ada berbagai institusi dan kondisi bila mana system yang dijalankan oleh suatu negara bisa disebut sebagai sebuah sistem yang demokratis.

Salah satu institusi yang tidak bisa dilepaskan dari demokrasi modern ini adalah adanya partai politik yang saling berjuang untuk meraih kekuasaan. Dan sudah menjadi aksioma dalam ilmu politik bahwa suatu negara dapat disebut demokratis kalau terdapat partai-partai politik. Sebab, kehadiran partai politik berarti ada pengakuan warga negara untuk berbeda pendapat.<sup>2</sup>

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. sebagai suatu demokrasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara abash (*legitimate*) dan damai. Karena itu, "partai politik dalam pengertian modern dapat didefenisikan sebagai sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mmempengaruhi tinndakaan-tindaakan pemerintahan.<sup>3</sup> Partai politik merupakan salah satu institusi inti dari pelaksanaan demokrasi modern. Demokrasi modern mengandaikan sebuah sistem yang disebut keterwakilan (*representativeness*), baik keterwakilan dalam lembaga formal kenegeraan seperti

---

<sup>2</sup> Schattsneider 1942, Rostow 1970 di dalam Riswandha Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1997) hal. 8

<sup>3</sup> Dr. Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Ed)(PT. Tiara Wacana Yogya, 1988) hal.

parlemen (DPR/DPRD) maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian.<sup>4</sup>

Berdasarkan aspek kesejarahannya, sejarah awal lahirnya partai politik bisa dipisahkan menjadi dua karakteristik umum, yaitu partai politik yang lahir dalam parlemen dan partai politik yang lahir ekstraparlemen. Di Inggris dan Prancis, kegiatan politik boleh dikatakan sangat terinspirasi oleh model pemilihan pemimpin yang cenderung aristokratis, karena sistem pemerintahannya yang menganut paham monarki. Para petinggi kerajaan, setelah hak pilih mulai mendapat ruang segar, lambat laun mulai memberanikan diri membentuk panitia-panitia pemilihan. Dan hal itu dilakukan dari dalam parlemen ke ekstraparlemen. Interaksi antara para petinggi kerajaan (sebagai politisi parlementer) dengan panitia-panitia pemilihan di luar parlemen pun berjalan sangat harmonis. Mereka saling bekerjasama menggalang dan memperjuangkan kepentingan masing-masing. Lahirnya partai politik yang berembrio dari dalam parlemen seperti disebutkan di atas lebih bersifat *patronage party* (partai perlindungan) serta cenderung tidak mempunyai disiplin administrasi yang rummut dan ketat.<sup>5</sup>

Selanjutnya, sejarah perjalanan partai politik di Barat mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Partai politik mulai dibentuk bukan atas permainan stereotype para bangsawan, melainkan muncul dari luar parlemen. Partai-partai tersebut

---

<sup>4</sup> Koirudin, *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi : Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004) hal 1

<sup>5</sup> Koirudin, ...Ibid., hal 24

bersandar pada suatu pandangan ideologis tertentu seperti sosialisme, Kristen demokrat, dan sebagainya. Berbeda dengan karakter pertama, partai semacam ini mempunyai aturan kuat dan pemimpinnya lebih terpusat.<sup>6</sup>

Secara historiografis, ide untuk membentuk partai politik sudah menunjukkan indikasinya pada era *Renaissance* dan *Aufklarung*. Manakala kekuasaan para raja dikecam dan mulai dibatasi, sebenarnya keinginan untuk membentuk partai politik sudah mulai bermunculan. Terlebih-lebih hak pilih bagi rakyat sudah diberikan secara luas.

Setelah wacana perluasan hak-hak politik bagi rakyat semakin meningkat dengan pesat itulah, partai politik seakan-akan telah lahir dengan sendirinya secara spontan. Apalagi, keterlibatan rakyat dalam proses politik yang ada waktu itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang urgen dan mendesak. Maka sebagai wujud interaksi antara pemerintah dan rakyat, diperlukan kendaraan politik yang diasumsikan mampu menjaga simbiosis antara keduanya. Dan kendaraan politik tersebut pada akhirnya bernama partai politik.<sup>7</sup>

Pengaruh pemikiran politik dunia terhadap perkembangan perpolitikan di Indonesia, sesungguhnya telah dimulai semenjak masa pra kemerdekaan ( Faith, 1988: 39). Pengaruh tersebut dapat dirasakan semenjak bangkitnya nasionalisme pada pertengahan tahun 1900-1910, yang dalam hal ini dipelopori oleh komunitas

---

<sup>6</sup> Koirudin, ...Ibid., hal 24-25

<sup>7</sup> Koirudin, ...Ibid., hal 25

ceudekiawan muda. Tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908, Dr Soetomo dan teman-temannya berhasil membentuk sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo.

Semenjak berdirinya Budi Utomo itulah, dinamika pergerakan nasional berkembang sangat pesat. Pada permulaan berdiri, perkumpulan semacam Budi utomo tersebut hanya berkembang dalam lingkaran pemuda dan kaum terpelajar dalam bentuk *studi club*. Lantas dalam pertumbuhan berikutnya, perkumpulan tersebut berubah menjadi organisasi massa dan partai-partai yang didukung oleh petani dan golongan buruh.

Membahas sejarah partai politik di Indonesia pada pasca kemerdekaan, terutama di Indonesia pada era Orde Lama, setidaknya bisa dirunutkan pada studi Feith mengenai pemikiran politik Indonesia tahun 1945-1965. Setidaknya ini merupakan studi yang cukup komprehensif dalam melakukan analisis pemikiran politik yang menjadi dasar lahirnya partai-partai politik berbasis ideologi di Indonesia. Secara umum Feith mengkategorikan pemikiran politik di Indonesia pada tahun 1945-1965 dalam lima aliran politik: nasionalisme radikal, tradisional Jawa, Islam, sosialisme demokrat dan komunisme. Sampai kini, tidak jarang kategori pemikiran politik (ideologi) dalam berbagai bentuk kelompok parpol sebagaimana dipelajari feith masih relevan digunakan.<sup>8</sup>

Partai politik di Indonesia yang telah berdiri sejak masa kolonial telah menjalani beberapa fase perkembangan sesuai dengan rezim yang membentuknya.

---

<sup>8</sup> Feith, didalam Koirudin, ... Ibid, hal 25-26

Pada masa kolonial, partai politik lahir sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Kegiatan kepartaian pada masa jepang mengalami penurunan drastic dengan dibubarkannya partai-partai ini karena penjajah jepang tidak mentolerir dan melarang semua kegiatan politik. Hanya golongan Islam diperkenankan membentuk suatu organisasi sosial yang dinamakan Masyumi.<sup>9</sup>

Setelah mengalami penurunan peran pada masa penduduk jepang, peranan partai politik mengalami masa kejayaan pada masa demokrasi parlementer. Usaha ke arah pembentukan pemerintahan yang demokratis dengan partai politik sebagai pilar utamanya mengalami kegagalan karena demokrasi berkembaang menjadi demokrasi yang tidak terkendali (*unbridled democracy*). Pada saat itu mulailah rezim otoriter yaitu demokrasi terpipmpin dan demokrasi pancasila. Pada dua periode ini beberapa pasal dari UUD 1945 di beri tafsiran khusus sehingga dibuka peluang untuk berkembangnya sistem non-demokrasi. Dalam kedua rezim otoriter ini, partai politik tidak banyak memainkan peran bahkan dapat dikatakan perannya dikooptasi oleh presiden oleh presiden Soekarno pada masa demokrasi terpipin dan oleh presiden Soeharto pada masa demokrasi pancasila. Keadaan non-demokratis ini berlangsung selama hampir 40 tahun.<sup>10</sup>

Semenjak bergulirnya reformasi pada tahun 2008 yang dipelopori oleh beberapa aktor baik mahasiswa maupun aktor politik, Indonesia mulai mengalami

---

<sup>9</sup> PROF. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008) hal 448

<sup>10</sup> PROF, Miriam Budiardjo ,...Ibid.,. hal 448

kesadaran politik yang cukup meningkat, apalagi pada tataran wilayah perempuan, perempuan menjadi wacana yang cukup digubris oleh diberbagai media. pada pemilu 1999. Wacana tentang gender menguak kembali kepermukaan. Tetapi kesadaran politik perempuan belum juga mengalami kemajuan yang diharapkan. Ironis memang, seharusnya dalam pelaksanaan pemilu di indonesia, keterwakilan perempuan dalam dunia politik bisa lebih besar dari laki-laki, karena pemilih perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, namun dalam kenyataannya persentase perempuan yang memilih caleg perempuan ternyata lebih kecil dibandingkan persentase perempuan yang memilih caleg laki-laki. Sebagai contoh, pada pemilu 1999 pemilih perempuan mencapai 57%, tetapi yang terpilih menjadi anggota DPR hanya 9%, angka ini lebih kecil dibandingkan dengan pemilu 1997 yang mencapai 11%. Belajar dari sejarah pemilu terdahulu yaitu banyak parpol yang tidak mampu memenuhi jumlah caleg perempuan.<sup>11</sup>

Selanjutnya dalam satu periode pemerintahan republik Indonesia, semenjak dari tahun 2004 hingga memasuki pergantian pemerintahan pada tahun 2009, perempuan menjadi wacana yang dalam kategori amat penting. Perempuan mulai dikuatkan posisinya sebagai aktor dalam memecahkan persoalan bangsa. Perempuan harus mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Hal ini pun kemudian dikuatkan oleh undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu.

---

<sup>11</sup> <http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/opini/html> di akses tanggal 2 november 2008

Berbicara tentang keterwakilan perempuan di parlemen (badan legislatif pusat atau daerah) sesungguhnya sama saja dengan berbicara tentang peran dan posisi perempuan dalam dunia politik di Indonesia. Kemudian pembicaraan itu pun akan selalu terkait dengan proses pemilu, rekrutmen partai politik dan undang-undang pemilu serta undang-undang politik. Berangkat dari masalah peran dan posisi politik perempuan itu, maka terdapat dua agenda yang sangat sensitif yaitu, *pertama* konstruksi tentang peran dan posisi perempuan dalam politik dan institusi parlemen di Indonesia yang selalu ditempatkan dikelas dua. *Kedua* konstruksi tentang partai politik dan institusi parlemen di Indonesia yang sangat maskulin.<sup>12</sup>

Dilihat dari kondisi masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya notabene lebih banyak perempuan dari pada laki-laki tidak menutup kemungkinan selama ini keinginan atau suara dari hati nurani perempuan banyak yang tidak terakomodir oleh pemerintah, alasan lain yang mendukung juga adalah keterwakilan perempuan parlemen memberi hak warga negara untuk berapresiasi khususnya dalam memecahkan persoalan bangsa.

Tidak ada rintangan hukum formal yang menghalangi perempuan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan di Indonesia. Namun jumlah perempuan yang memegang jabatan-jabatan terpilih masih tetap rendah. Selama 56 tahun terakhir semenjak kemerdekaan negeri ini, perempuan Indonesia telah menghadapi sejumlah

---

<sup>12</sup> <http://mirisa.wordpress.com/2008/08/23/keterwakilan-perempuan-di-partai-partai-politik-dan-parlemen-serta-urgensi-basis-gerkannya>, diakses tanggal 17 Oktober 2008



hambatan dalam dalam lingkungan publik dan pribadi, dimana secara politik, hukum, sosial, dan ekonomi mereka sering dikecewakan. Ketidakberuntungan ini tertanam secara terstruktur dalam masyarakat.

Perempuan diberi hak untuk memilih dan bersaing dalam pemilihan pada tahun 1945. Namun, secara historis tingkat representasi politik perempuan di Indonesia tetap rendah. Pada periode legislatif antara tahun 1950 dan 1955, perempuan merupakan 3,8 persen dari seluruh anggota parlemen dan 6,3 persen antara tahun 1955 dan 1960. Selama 30 tahun berikutnya, representasi perempuan tertinggi sebesar 13 persen dicapai pada periode legislatif tahun 1987 sampai 1992. Di parlemen, dan institusi-institusi politik lainnya ditingkat lokal, propinsi dan nasional, representasi perempuan masih saja rendah.

Dalam hubungannya dengan kehidupan publik, ada sejumlah faktor yang tidak menguntungkan perempuan Indonesia yang masuk ke dunia politik. Sebagai contoh, persepsi dikotomi antara lingkungan publik dan pribadi telah mempersulit perempuan Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan politik negeri mereka. Faktor berikutnya adalah sifat dari sistem pemilihan, dan bagaimana partai-partai politik memajukan dan mempromosikan perempuan sebagai kandidat dalam pemilihan. Partai politik yang secara efektif merupakan penjaga pintu bagi jabatan pilihan bagaimana dan dimana perempuan ditempatkan dalam daftar calon partai

mempunyai pengaruh penting terhadap jumlah perempuan yang terpilih masuk ke parlemen.<sup>13</sup>

Didalam undang-undang partai politik no 2 tahun 2008 menegaskan bahwa didalam tubuh parpol baik pusat maupun daerah harus terdapat keterwakilan perempuan dengan jumlah 30% (tiga puluh persen).<sup>14</sup>Dalam kaitannya dengan demokrasi ini merupakan langkah awal yang dibangun oleh pemerintah dalam rangka menciptakan keadilan khususnya dalam hak untuk berpolitik. Menurut hemat penulis ada banyak hal yang menjadi poin penting yang berkaitan dengan jumlah 30% keerwakilan perempuan ini yang sekaigus menjadi problem bangsa indonesia yaitu:

1. Memperkuat kesadaran politik perempuan
2. Setiap warga negara berhak untuk berpolitik
3. Suara perempuan yang masih belum mampu mengakomodir aspirasi perempuan di tingkatan parlemen
4. Warga negara mempunyai hak yang sama dalam menentukan arah bangsa
5. Kesetaraan gender

---

<sup>13</sup> <http://www.idea.int/publications/wip/upload/CS2-Indonesia2.pdf> diakses 2 november 2008

<sup>14</sup> UU partai politik No 2 tahun 2008

Menarik untuk dibahas adalah kelahiran Partai Amanat Nasional atau sering disingkat (PAN) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Asas partai ini adalah “Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam” (AD Bab II, Pasal 3 [2]). PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998 berdasarkan pengesahan Depkehh HAM No. M-20.UM.06.08 tgl. 27 Agustus 2003. Ketua Majelis Penasehat Partai dijabat oleh Amien Rais. Wakil ketua dijabat oleh Hatta Rajasa dan A.M Fatwa.

Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, PPSK Muhammadiyah, dan kelompok Tebet. PAN dideklarasikan di Jakarta pada 23 Agustus, 1998 oleh 50 tokoh nasional, diantaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, mantan ketua umum Muhammadiyah, Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Faisal Basri MA, A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao dan lainnya.

Sebelum pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus, 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN pernah melontarkan gagasan wacana dialog bentuk negara federasi sebagai jawaban atas ancaman disintegrasi. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam mengelola sumber

daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa. Pada Pemilu 2004, PAN mencalonkan pasangan Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo sebagai calon presiden untuk dipilih secara langsung. Pasangan ini meraih hampir 15% suara nasional.<sup>15</sup>

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional DIY mulai menjaring Bakal Calon Anggota Legislatif Provinsi DIY mulai 11-13 Maret 2008 di kantor DPW PAN DIY Jl. Ngeksigondo No 5. Mekanisme diambil berbeda PAN pemilu 2009 ini, penentuan calon jadi anggota legislatif yang akan duduk di DPR/DPRD seluruh Indonesia tak lagi berdasar nomor urut tetapi suara terbanyak.

Menurut ketua Tim Pendaftaran Beben Rubianto Sip, PAN tidak lagi mendasarkan penentuan calon berdasarkan nomor urut karena mengurangi kualitas bobot legitimasi anggota dewan yang terpilih. Mekanisme suara terbanyak sejalan dengan prinsip demokrasi dimana suara rakyat merupakan legitimasi politik. "sistem pemilu 1999 dan 2004 belum sepenuhnya menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas dan representatif, karena penentuan calon ditentukan berdasar nomor urut yang subyektif dan sarat kepentingan elit politik yang berimplikasi mengorbankan partisipasi politik masyarakat luas.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Immawan Wahyudi mengatakan PAN DIY

---

<sup>15</sup> [http://id.Wikipedia.org/wiki/Partai Amanat Nasional](http://id.Wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional), di akses tanggal 26 september 2008

menempatkan calon anggota legislatif perempuan pada nomor urut satu disemua daerah pemilihan provinsi DIY. Kebijakan tersebut merupakan apresiasi PAN terhadap kaum perempuan khususnya dalam berpolitik. Immawan Wahyudi mengatakan dengan tampilnya perempuan dipentas politik diharapkan dapat membuat perubahan dan menciptakan, kemajuan serta kemakmuran rakyat. Dengan menempatkan caleg perempuan pada nomor urut satu tidak mengundang kecemburuan caleg laki-laki, dan sebaliknya mereka tidak keberatan serta mendukung kebijakan itu. Pemilu legislative 2009 PAN DIY mendaftarkan 54 caleg ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi DIY. Dari jumlah tersebut 38 persen diantaranya kaum perempuan. Dengan demikian PAN DIY telah memenuhi ketentuan undang-undang yang mengamanatkan caleg perempuan 30 persen. Dengan memberi porsi caleg perempuan sebanyak itu, menunjukkan PAN percaya terhadap perempuan mampu melakukan perubahan kearah yang lebih baik jika mereka diberi kesempatan.<sup>16</sup>

Dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kader yang mempunyai kapasitas PAN mempunyai organisasi kader partai yang berbasis massa beridentitaskan kebangsaan dan kemajemukan yang menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan yaitu Barisan Muda Penegak Amanat Nasional disingkat BM PAN. BM PAN adalah organisasi otonom yang resmi bernaung dibawah Partai Amanat Nasional yang di bentuk dan memiliki hubungan struktur antara DPP, DPW, DPD, DPC, dan DPRt

<sup>16</sup> <http://www.inilah.com/berita/pemilu-2009/2008/08/21/45212/caleg-perempuan-pan-di-urutan-satu/21/08/2009> 16:19, diakses 26 september 2008

yang didirikan di Jakarta pada tanggal 23 agustus 1998. Orientasi mendasar perjuangan BM PAN adalah bagaimana membangun bangsa dan masyarakat yang demokratis. Tahapan ideal proses demokratis yang diyakini BM PAN berawal dari demokrasi politik, demokrasi sosial selanjutnya demokrasi ekonomi. Demokrasi politik hanya terjadi bila kekuasaan rakyat di atas kekuasaan negara. Dan demokrasi sosial muncul efektif bila jaminan kesejahteraan negara mendapat alokasi memadai. Sementara itu demokrasi ekonomi lahir jika kekuatan dan kekuasaan produktif ada pada sebagian besar rakyat.

Upaya mewujudkan ketiga tahapan demokrasi diatas memerlukan individu-individu yang mampu melakukan proses transformasi demokrasi secara sehat. Kemudian secara individual maupun institusional BM PAN membangun kekuatan kelas menengah dalam wilayah pendidikan. Dengan posisi itu, BM PAN akan mampu menjadi mediator yang berhubungan dengan kaum elite dengan proleter, antara negara dengan rakyat. Posisi ini juga mudah bergerak keatas maupun kebawah sesuai dengan situasi yang terjadi. Dengan orientasi dasar semacam ini BM PAN akan mampu menembus sekat elite sekaligus membaaur dengan rakyat tanpa terkooptasi keduanya. Untuk memerankan fungsi kelas menengah, BM PAN perlu membangun perangkat-parangkat gerakan sehingga tidak terjerembab pada pola gerakan yang

semu dan kabur. Perangkat tersebut secara global meliputi wilayah transendensi, refleksi dan aksi.<sup>17</sup>

Partai Amanat Nasional (PAN) yang mana diatas telah disampaikan oleh ketua DPW PAN DIY sendiri Immanuel wahyudi yang telah memenuhi quota 30% caleg perempuan dalam rangka untuk mengikuti pemilu legislatif 2009 merupakan hal yang melatarbelakangi peneliti untuk dijadikan suatu obyek penelitian, dimana peneliti di sini ingin mengetahui bagaimana pola kaderisasi yang dijalankan oleh PAN, bahkan PAN mengenakan perempuan pada caleg nomor urut satu dalam setiap daerah pemilihan di Yogyakarta.

Selain sudah terpenuhinya quota 30% perempuan ada beberapa hal yang menarik untuk diketahui, hadirnya partai baru yang berideologi islam yaitu Partai Matahari Bangsa (PMB) dimana mereka berasumsi kantong massanya adalah orang muhammadiyah.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan di dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana pola pengkaderan PAN DIY untuk memenuhi 30% keterwakilan perempuan dalam menyongsong pemilu 2009?”

---

<sup>17</sup> <http://www.bmpn-diy.org/profil.htm> diakses tanggal 2 november 2008

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola kaderisasi Partai Amanat Nasional di dewan pimpinan wilayah PAN daerah istimewa Yogyakarta khususnya pada ruang lingkup pengkaderan di wilayah perempuan, sebagai syarat 30% kerwakilan di parpol, dalam menyongsong pemilu 2009.

Sedangkan manfaatnya adalah dengan penelitian ini dapat memberikan pengayaan ilmu sosial secara umum dan ilmu politik khususnya, serta dapat memberikan manfaat bagi partai politik dalam proses pola kaderisasi.

### **D. Kerangka Dasar Teori**

Teori didalam suatu penelitian dan penulisan ilmiah sangatlah penting, disini teori dimaksudkan untuk menyatakan hubungan fenomena yang akan diteliti, sehingga aktifitas ini menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Sebelum melangkah kepada teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada baiknya penulis menyebutkan defenisi dari teori itu sendiri yang telah ditentukan oleh Sofyan Effendi yaitu:

Teori adalah sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti. Teori adalah rangkaian logis dari satu priposisi atau lebih.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sofyan Effendi dan Marsi Singarumbun, metode penelitian survey, (LP3S, Jakarta, 1984), hal 18-19



Defenisi lain menurut Sofyan Effendi, sebagai berikut:

Teori merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi pengertian-pengertian maupun hubungan pada proposisi<sup>19</sup>

Dari pendapat tersebut dapat dimengerti bahwa teori pada dasarnya merupakan penjelasan sistematis antara fenomena atau gejala dan fenomena tersebut merupakan suatu masalah, sehingga teori ini dapat digunakan sebagai pemecah masalah. Jadi, teori merupakan landasan untuk memecahkan masalah. Maka daripada itu suatu teori merupakan acuan didalam melakukan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya oleh para masing-masing ahli dan telah banyak pula dipergunakan oleh para peneliti didalam melakukan suatu penelitian.

### **1. Pemilu**

Untuk menentukan alternatif kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah biasanya yang menyangkut hal yang prinsipil beberapa negara menyelenggarakan pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksian kebijakan umum. Ada tiga pengertian dari pemilu:

*Pertama*, pemilihan umum merupakan mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya.

---

<sup>19</sup> Sofyan Effendi, ...Ibid, hal. 19

*Kedua*, pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai mekanisme pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

*Ketiga*, pemilihan umum merupakan sarana memobilisasi dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.<sup>20</sup>

Selanjutnya mengacu pada tata cara pemilihan umum dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2008 Tentang pemilihan umum, ditetapkan asas sebagai berikut:

a. Langsung

Rakyat atau pemilih memiliki hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal usia 17 tahun atau telah pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang berusia 21 tahun berhak dipilih, jadi pemilu yang bersifat umum mengandung makna menjamin

---

<sup>20</sup> Ramlan Surbakti., Op.Cit., hal 181-182

kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Dalam melaksanakan hak-haknya, setiap warga negara kemananya dijamin sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikannya suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak di ketahui pihak manapun dan dengan jalan apapun pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum penyelenggara atau pelaksana, pemerintah dan partai politik, peserta pemiliha umum, pengawas dan pemantau pemilihan umum, termasuk pemilih serta semua yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilih dan partai politik, peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

## **2. Partai Politik**

### **a. Pengertian Partai Politik**

Secara sederhana pengertian partai politik adalah, kumpulan orang perorang yang bergabung didalam suatu organisasi yang diikat oleh nilai dan tujuan serta cita-cita yang sama, dimana cita-cita dan tujuan dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan mereka dengan meraih kekuasaan politik yang sah secara konstitusional.

Dalam undang-undang parpol No 2 tahun 2008 tentang partai politik, menjelaskan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut para ahli pengertian partai politik adalah:

a). Menurut Carl J. Friedrich

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.<sup>22</sup>

b). Menurut Sigmund Neumann

partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Undang-Undang ,...ibid

<sup>22</sup> Carl J. Friedrich, didalam PROF Miriam Budiarmo,...Ibid., hal 404

<sup>23</sup> Sigmund Neumann, di dalam Ibid., hal 404

c). Menurut Giovanni Sartori

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.<sup>24</sup>

d). Menurut Mark N. Hagopian

Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi dalam pemilihan.<sup>25</sup>

e) Menurut Rusadi Kantaprawira

Partai politik adalah organisasi-organisasi manusia dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai program politik sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih baik pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Giovanni Sartori, didalam Ibid., hal 404-405

<sup>25</sup> Mark N. Hagopian, didalam Ichlasul Amal,...Ibid., hal xv

<sup>26</sup> Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, (Sinar Baru Bandung, 1998)., hal 63

## **b. Fungsi Partai Politik**

Dalam kehidupan kenegaraan fungsi partai politik yang jelas-jelas tampak adalah sebagai sarana rekrutmen politik untuk menduduki jabatan politik seperti menjadi anggota DPR, DPRD, menjadi penguasa daerah seperti Bupati atau Gubernur ataupun menjadi presiden. Sedangkan menurut para ahli fungsi partai politik tidak hanya terbatas pada rekrutmen politik saja.

Menurut Miriam Budiarto fungsi partai politik ada empat yaitu:

### **a. Sebagai sarana komunikasi politik**

Di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara dipadang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi yang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumus dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*).

Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini di masukkan ke dalam program atau *platform*

partai (*goal formulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*).

b. Sebagai sarana sosialisasi politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa.

M. Rush (1992) merumuskan definisi sosialisasi politik sebagai berikut:

Sosialisasi politik adalah proses yang melalui nya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali system politiknya. Proses ini



sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik.<sup>27</sup>

c. Sebagai sarana rekrutmen politik

Rekrutmen politik sangat berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri.

Selain untuk tingkatkan seperti itu, partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanya-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Rekrumen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

d. Sebagai sarana pengatur konflik (*conflict Management*)

Realitas masyarakat yang bersifat heterogen potensi konflik selalu muncul, maka disini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur

---

<sup>27</sup> M. Rush, didalam Miriam Budiarjo .,Op.Cit.,hal. 407

sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.<sup>28</sup>

Menurut Markovic partai politik memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Artikulasi kebutuhan, kepentingan dan aspirasi berbagai kelompok sosial.
- b. Menggariskan alternatif jangka panjang dan menengah untuk tujuan-tujuan sosial.
- c. Perumusan program untuk mencapai tujuan.
- d. Mengintegrasikan berbagai penduduk kearah tujuan bersama.
- e. Mencarikan pemecahan kompromis konflik antar kebangsaan, ras, agama dan kelas.
- f. Rekrutmen dan pemilihan pemimpin dan fungsionaris politik yang berbakat.
- g. Pengorganisasian kampanye pemilihan umum untuk mewakili kelompok sosial yang ada.

---

<sup>28</sup> Miriam Budiarto, ....ibid., hal 405-409

h. Control dan kritik terhadap pemerintah.<sup>29</sup>

Realitas politik di Indonesia, partai politik belum mampu melaksanakan fungsi-fungsinya secara maksimal dan sepenuhnya seperti idealnya fungsi partai politik. Seperti pendidikan politik, partai politik hanya sebagai wahana sekaligus praktek pembodohan masyarakat, yang pada koridornya masyarakat mempunyai kedaulatan didalam sistem demokrasi hanya menjadi obyek kekuasaan politik belaka. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang mempunyai kedaulatan adalah para elite politik, keinginan para elite politik seolah-olah dipandang keinginan masyarakat.

Jauh lagi dari harapan adalah fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik, adanya perbedaan dan kepentingan dalam masyarakat tidak dapat secara bijak didengarrkan dan cermat dirumuskan hingga kemudian dipecahkan oleh wakil partai politik di parlemen.

Masyarakat akan menigkat kepercayaannya apabila patai politik secara maksimal dapat melaksakan fungsinya dengan baik. Sehingga kahadiran partai politik memang menjadi sebuah wahana didalam

---

<sup>29</sup> Markovic didalam M. Rusli Karim, *pemilu demokratis Kompetitif* (Tiara Wacana Yogyakarta, 1991) hal. 9

melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sekaligus menuju pada tujuan negara yang dicita-citakan bersama.

### **c. Sistem Kepartaian**

Menurut Maurice Duverger dalam bukunya *Political Parties* demikian juga dengan G.A Jacobsen dan M.H Lipman dalam bukunya *Political Science* mengklasifikasikan system kepartaian kedalam tiga macam system, yaitu:

#### **a). Sistem partai tunggal (one party system)**

partai politik merupakan alat pemerintahan dari perhimpunan sukarela pada pemilih, sistem partai tunggal meliputi baik negara yang benar-benar hanya mempunyai satu partai di samping itu juga negara dimana ada satu partai yang dominan. Dalam negara dengan partai tunggal, keadaan kepartaian negara dalam tersebut dapat dinamakan tidak bersaing atau non kompetitif, disebabkan karena partai-partai yang ada dalam negara harus menerima pimpinan dari partai yang dominan serta tidak dibenarkan untuk bersaing secara bebas dan terbuka.

#### **b). Sistem dua partai (two party system)**

di negara tersebut ada dua partai atau lebih dari dua partai, akan tetapi yang memegang peranan dominan hannya dua partai, partai di bagi

menjadi dua yaitu partai besar yang berkuasa, karena memang dalam pemilihan umum dinamakan mayoritas party, partai ini memegang tanggung jawab untuk urusan-urusan umum. Sedangkan lainnya dinamakan minoritas party atau partai oposisi karena kalah dalam pemilihan umum. Partai oposisi mempunyai tugas untuk memeriksa dengan teliti dan mengkritik politik pemerintah.

c). sistem multi partai (multy party system)

dalam negara tersebut ada beberapa partai yang hampir sama kekuatannya. Masing-masing partai mempertahankan suatu politik tertentu tentang satu atau sejumlah persoalan-persoalan yang penting. Suatu negara dengan sistem multi partai masing-masing pemilih partai mendukung partai yang hampir sesuai dan mewakili pendukungnya sendiri.<sup>30</sup>

**d. Tipologi partai politik**

Pada dasarnya pemahaman masyarakat terhadap partai politik adalah sama, yaitu sebuah organisasi yang orientasinya meraih kekuasaan dan hanya tampak hadir di ruang publik atau ketengah-tengah masyarakat pada waktu pemilihan umum saja dan akan menghilang setelah berakhirnya pemilihan umum. Namun yang lebih ekstrim lagi banyak

---

<sup>30</sup>Maurice Duverger, G.A. Jacobson dan M.H. Lipman, di dalam Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, (Galia Indonesia, Yogyakarta, 1984), hal. 114-115

asumsi yang mengatakan partai adalah kumpulan orang-orang didalam suatu organisasi yang bekerja untuk memanipulasi rakyat untuk kepentingan mereka semata. Adanya pemahaman masyarakat yang menyatakan partai politik semuanya sama tidak dapat disalahkan namun secara teoritis tentu saja tidak dapat dibenarkan karena pada konsep idealnya partai politik mempunyai masing-masing tipologi.

Ramlan Subakti<sup>31</sup> mengatakan bahwa "tipologi partai politik adalah pengklasifikasian partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Berikut penjelasan Ramlan Subakti mengenai tipologi partai politik.

#### A). Asas dan Orientasi

Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe. Adapun ketiganya adalah partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan.

Partai politik pragmatis adalah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Artinya, perubahan waktu, situasi dan kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan dan penampilan partai politik tersebut. Penampilan partai politik pragmatis cenderung merupakan

---

<sup>31</sup> Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik (PT. Grasindo, Jakarta, 2005) hal 121

cerminan dari program-program yang disusun oleh pemimpin utamanya dan gaya kepemimpinan sang kepemimpinan. Partai ini biasanya terorganisasikan secara agak longgar. Hal ini tidak berarti partai politik pragmatis tidak memiliki ideologi sebagai identitasnya.

Sedangkan yang disebut dengan partai doktriner ialah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan kongkrit sebagai penjabaran ideologi. Ideologi yang di maksud seperangkat nilai politik yang dirumuskan dalam bentuk program-program kegiatan yang dipelaksanaanya diawasi secara ketat oleh aparat partai. Pergantian kepemimpinan mengubah gaya kepemimpinan pada tingkat tertentu, tetapi tidak mengubah prinsip dan program dasar partai karena ideologi partai sudah dirumuskan secara konkrit dan partai ini terorganisasikan secara ketat.

Berikutnya, partai kepemimpinan merupakan suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti, petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Partai ini sering ditemui dalam sistem banyak partai tetapi kkadangkaala terdapat pula dalam sistem dua partai berkompetisi namun tak mampu mengakomodasi sejumlah kepentingan dalam masyarakat.

#### b). Komposisi dan Fungsi Anggota

Menurut komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik digolongkan menjadi dua, yaitu partai massa dan partai kader. Yang dimaksud partai politik massa ialah partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi masa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat di mobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan tujuan tertentu. Partai ini seringkali merupakan gabungan berbagai aliran politik yang sepakat untuk berada dalam lindungan partai guna memperjuangkan dan melaksanakan program-program yang pada umumnya bersifat sangat umum.

Partai kader adalah suatu partai yang mengendalikan kualitas anggota, kekuatan organisasi dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai politik kader biasanya sangat ketat yaitu, melalui kaderisasi yang berjuang dan intensif, serta struktur organisasi partai ini sangat hierarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas. Karena sifatnya yang demikian partai kader seringkali disebut partai yang sangat elitis.



c). Basis Sosial dan Tujuan

Partai politik berdasarkan basis sosial dan tujuannya dapat dibagi menjadi empat tipe.

*Pertama*, partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah dan bawah

*Kedua*, partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok tertentu, seperti, petani, buruh dan pengusaha.

*Ketiga*. Partai politik yang anggota-anggotanya pemeluk agama tertentu, seperti, Islam, Protestan, Katolik, Budha dan Hindu.

*Keempat*, partai politik bangsa, bahasa, dan daerah tertentu. Dalam kenyataannya, kebanyakan partai politik tidak hanya mempunyai basis sosial dari kalangan tertentu tetapi juga dari berbagai kalangan dengan satu atau dua kelompok sebagai pihak yang dominan.

Berdasarkan tujuan, partai politik dibagi menjadi tiga.

*Pertama*, partai perwakilan kelompok, artinya partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen.

*Kedua*, partai pembinaan bangsa, artinya partai yang bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit.

*Ketiga*, partai mobilisasi, artinya partai yang berupaya memobilisasi masyarakat kearah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan bersifat monopolistis karena hanya ada satu partai dalam masyarakat.<sup>32</sup>

**e. Jenis-jenis partai politik yang dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap ideology:**

**1. Partai Proto**

Partai proto adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan dewasa ini. Ciri paling menonjol partai proto adalah perbedaan antara kelompok anggota dengan non anggota, partai ini belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern. Karena itu sesungguhnya partai proto adalah faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologis masyarakat.

---

<sup>32</sup> Ramlan surbakti,...ibid.,ha 122-124

## 2. Partai Kader

Merupakan perkembangan lebih lanjut partai proto. Partai ini muncul sebelum diterapkan system hak pilih secara luas bagi rakyat hingga sangat bergantung pada masyarakat kelas menengah keatas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta para pemberi dana. Tingkat organisasi dan ideologi partai kader sesungguhnya masih rendah karena aktivitasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. Keanggotaan partai ini terutama berasal dari golongan kelas menengah keatas. Akibatnya, ideologi yang dianut partai ini adalah Konservatisme ekstrim atau maksimal Reformise moderat. Karena itu partai kader tidak memerlukan organisasi besar yang memobilisas massa.

## 3. Partai Massa

Partai ini muncul pada saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai suatu respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Partai massa dibentuk di luar parlemen, berorientasi pada pendukung yang luas misalnya, buruh, dan kelompok agama dan memiliki ideologi yang cukup jelas untuk memobilisasi

massa dan mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya.

#### 4. Partai Diktatorial

Merupakan sub-tipe dari partai massa, tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai ini melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota partai-partai.

#### 5. Partai Catch-all

Partai merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Catch-all dapat diartikan sebagai “menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya.” Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku.<sup>33</sup>

### **f. Karakteristik Partai Politik**

Maurice Duverger didalam bukunya *political parties*, mengatakan bahwa mencapai perbedaan karakteristik partai-partai politik guna menangkap pengertian atau konsep partai politik itu sendiri, bias

---

<sup>33</sup> Dr. Ichlasul Amal (Ed), Op.Cit., hal xvi-xvii

dikatakan dengan melihat struktur dan anatomi masing-masing partai politik.

Untuk mencapai karakteristik partai-partai politik bias dilakukan dengan meninjau segi organisasi, keanggotaan ataupun aspek kepemimpinannya. Dengan ini Duverger mencoba mengklasifikasikan partai-partai politik berdasarkan *direct structure* dan *indirect structure*.

a). *Direct Structure*

keanggotaan seseorang dalam partai politik dilihat sebagai individu-individu yang secara langsung masuk dan mengikutkan diri dalam partai politik tertentu..

b). keanggotaan seseorang dalam partai politik diperoleh berdasarkan keikutsertaan dalam organisasi yang terikat kepada suatu partai politik tertentu, karena adanya kepentingan timbal balik.<sup>34</sup>

### **3. Pola Kaderisasi**

Pola kaderisasi di organisasi manapun merupakan urat nadi bagi sebuah organisasi. Karena bagaimanapun prosesi kaderisasi bergantung pada pola, bentuk atau cara dari pengkaderannya. Kaderisasi adalah proses penyiapan SDM agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun

---

<sup>34</sup> Maurice Duverger, didalam Cheppy Haricahyono, *ilmu politik dan perspektifnya* (Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991), hal 193

peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus. Dalam pengkaderan, ada dua persoalan yang penting:

*Pertama*, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan kemampuan baik keterampilan maupun pengetahuan.

*Kedua*, adalah kemampuan untuk menyediakan stok kader atau SDM organisasi, dan terutama dikhususkan pada kaum muda.<sup>35</sup>

Salah satu arus utama kaderisasi dan seleksi pemimpin adalah sistem kenegaraan yang demokratis adalah melalui partai politik. Tuntutan adanya suatu sistem politik yang lebih demokratis menjadi faktor yang penting dan punya pengaruh besar pada era reformasi. Saat ini beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh partai politik adalah bagaimana memulai menata diri agar proses seleksi kepemimpinan mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas.

Kemampuan sebuah partai untuk melakukan penggemblengan atau pematangan terhadap SDM-nya sangatlah dipengaruhi oleh kemampuan para pengurusnya untuk memfasilitasi pengadaan pendidikan dan pelatihan secara intensif di bidang-bidang tertentu terhadap kadernya. Hal ini dilakukan sejauh menyangkut peningkatan kemampuan secara simultan dan terencana pada semua tingkatan kepengurusan partai. Bagaimanapun partai membutuhkan

---

<sup>35</sup> Koirudin,...ibid., hal 113-114

kaum muda yang terdidik yang berkualitas untuk menjadi sasaran pengkaderan ini. Kaum muda sangat menentukan masa depan dan kualitas sebuah parpol pada masa mendatang.

Dalam sejarah bangsa ini, rekrutmen para pemimpin parpol sangat tergantung pada sistem kepolitikan yang dibangun. Pembahasan menarik tentu tentang peran dan fungsi pemerintah dalam memposisikan dirinya secara proporsional dan juga kemampuan partai untuk mengatur dirinya sendiri dan kemampuan untuk mempertahankan domain perannya dari intervensi kekuasaan.<sup>36</sup>

Selanjutnya pola kaderisasi berkaitan erat dengan fungsi partai politik yaitu sebagai sarana rekrutmen politik, yang dimana kita ketahui fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan. Idealnya dalam sebuah partai politik individu untuk memegang tampuk kepemimpinan baik di internal partai maupun eksternal harus melalui perekrutan terlebih dahulu dan baru kemudian mereka menempuh tahap yang di sebut kaderisasi. Proses kaderisasi tersebut yang akan menentukan individu tersebut mampu menjadi kader-kader yang berkualitas.

Ketika Indonesia menapaki tangga reformasi dengan dilaksanakannya pemilu 1999, eforia politik ditunjukkan dengan adanya partai-partai politik

---

<sup>36</sup> Koirudin, ...Ibid., hal. 114-115

yang cukup banyak tumbuh. Masa transisi ini melahirkan situasi serba kacau. Partai elit partai berlomba untuk mampu merekrut kader-kader berkualitas yang mampu dijadikan tulang punggung partainya, mulai dari tokoh agama, kyai, pendeta, tokoh masyarakat, intelektual kampus, praktisi bidang bisnis, hukum, wartawan dan sebagainya. Meskipun tidak semua mereka kita sebut sebagai “kader lompatan”, namun realitas tidak bisa berbohong bahwa sebagian besar dari mereka adalah “kader karbitan”.

Peran kader parpol sangat vital untuk membangun suatu kepemimpinan partai yang berkualitas. Bagimanapun wajah parpol ke depan sangat ditentukan oleh kualitas kader-kader yang dimilikinya, yang pada gilirannya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Meskipun peran dan fungsi partai politik sudah demikian bebas dibanding zaman sebelumnya, namun masalah kaderisasi ini masih menjadi persoalan serius. Masih banyak parpol yang belum mampu melakukan pengkaderan yang baik sehingga mereka melakukannya dengan serampangan, asal comot alias tambal sulam. Siapa yang mau masuk partai langsung diterima, tanpa prosedur dan persyaratan yang rumit. Masih beruntung bila masih mampu merekrut personal yang kemampuannya cukup bagus. Tapi dimana jaminannya itu bisa diletakkan, bukankah persoalan seriusnya di kemudian hari adalah minimnya kader-kader



parpol yang memiliki kemampuan dalam pengertian politik yang memadai, dan semakin banyaknya figur pragmatis tanpa pendirian.<sup>37</sup>

#### 4. Keterwakilan Perempuan di Parpol

Secara sederhana keterwakilan perempuan di parpol menurut hemat penulis dapat diambil dari beberapa kata dasar, yaitu keterwakilan yang berarti wakil atau yang mewakili baik itu individu maupun kelompok, perempuan yaitu jenis kelamin dan parpol yang berarti organisasi yang diikat oleh nilai dan tujuan serta mempunyai cita-cita yang sama. Sedangkan secara penggabungan kata dapat diartikan keterwakilan perempuan di parpol adalah, individu atau kelompok yaitu perempuan yang berkedudukan di partai politik dimana mereka terikat oleh nilai dan tujuan serta mempunyai cita-cita yang sama.

Hak politik perempuan pada dasarnya adalah hak asasi manusia, dan hak asasi manusia merupakan esensi dari kerangka demokrasi. Sehingga melibatkan perempuan dan laki-laki di dalam proses pengambilan keputusan menjadi syarat mutlak dalam demokrasi. Dalam teori ini sesungguhnya tidak lagi ada dikotomi perempuan - pria. Tapi pada kenyataannya hak perempuan masih dipolitisir dan di mobilisasi atas nama demokrasi.

Kebijakan-kebijakan politik harus pula dilihat dari perspektif gender. Kalau di dalam praktiknya partai politik menjadi hambatan budaya yang luar

---

<sup>37</sup> Koirudin,...Ibid,..hal. hal 119-120

biasa terhadap peran formal politik perempuan, maka perlu adanya quota bagi perempuan di setiap partai politik. Ada anggapan bahwa cukup hanya ada satu partai perempuan yang dapat mewakili aspirasi perempuan Indonesia. Hal ini sangat tidak arif dan salah besar. Perempuan Indonesia juga mempunyai beragam ideologi, agama, ras, suku, kelas sosial sebagaimana yang dimiliki oleh warga negara lainnya. Maka sekiranya pada setiap partai pada suatu kebijakan quota bagi perempuan untuk berperan di partai minimal 30 persen.<sup>38</sup>

#### **E. Defenisi konsepsional**

Di dalam suatu penelitian sangat perlu kiranya dikemukakan defenisi-defenisi dan batasan dari konsep yang akan digunakan, yang dimaksud dengan defenisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya agar tidak terjadi kesalah pahaman atau kerancuan, sementara konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan atau individu yang menjadi pusat ilmu pengetahuan.

---

<sup>38</sup> <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/9/27/op1htm>. diakses tanggal 2 november 2008

Adapun defenisi konsepsional yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pola

Pola adalah suatu gambaran proses kerja tertentu yang mengandung substansi dan tahapan-tahapan yang terencana sehingga dapat diperkirakan atau diukur hasil akhir dari proses kerja tertentu tersebut.

#### 2. Kaderisasi

Kaderisasi adalah proses penyiapan sumber daya manusia (SDM) nantinya mereka menjadi pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara baik.

#### 3. Partai Politik

Partai politik adalah, sekelompok individu dalam suatu organisasi yang mempunyai orientasi memperjuangkan kepentingan anggota yang memiliki nilai, tujuan dan cita-cita bersama.

#### 4. Pemilu

Pemilu adalah suatu mekanisme rotasi untk mengisi jabatan dilembaga pemerintahan yang diselenggarakan satu dalam lima tahun.

## **F. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional adalah mengoprasikan defenisi konsep guna mempermudah dalam melakukan kegiatan penelitian. menurut Masri Singarimbun defenisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana variable itu diukur. maka perlu ada bahasan-bahasan penelitian dengan menentukan indikator-indikatornya.

Defenisi operasional yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Pola kaderisasi partai politik adalah cara atau langkah yang dilakukan oleh partai politik untuk prosesi regenerasi dengan metode yang telah ditentukan guna menyiapkan kader-kader yang berkualitas dan mampu menjalankan roda organisasi dengan baik.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pola kaderisasi partai politik adalah:

1. Sejauh mana pola kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional untuk memenuhi 30% keterwakilan perempuan di partai politik sebagaimana telah tertera dalam undang-undang partai poilitik No 2 Tahun 2008.

2. Bagaimana Implementasi yang telah dilakukan oleh Partai Amanat Nasional terkait dengan Anggaran Dasar tentang rekrutmen 30% Perempuan.
- b. keterwakilan 30% perempuan di parpol adalah jumlah quota yang harus dipenuhi oleh partai politik terhadap perempuan didalam partai itu sendiri (pengurus partai) sebanyak 30/100 atau 30%. dengan indikator sebagai berikut.
1. Melihat data kepengurusan Partai Amanat Nasional apakah sudah memenuhi target 30% perempuan di partai politik.
  2. Bagaimana pola perkaderan yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional untuk memenuhi target 30% perempuan di partai politik.

## **G. Metode Penelitian**

### **1). Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, yang dimaksud penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>39</sup>

## 2). Jenis Data

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.<sup>40</sup>

Data yang penulis gunakan dalam penelitali ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari obyek yang diteliti (data langsung) yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen (data tidak langsung) melalui buku-buku atau referensi yang beerkaitaan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>41</sup>

## 3). Unit Analisa Data

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis akan melakukan kegiatan atau menyusun unit analisis datanya pada pihak terkait langsung serta dapat mewakili untuk dijadikan sumber data yang diperlukan. Adapun yang menjadi unit analisis data adalah dari pengurus DPW PAN DIY yang diantaranya: ketua DPW, wakil ketua DPW, ketua

---

<sup>39</sup> Moh. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian*, (Ghalia Indonesia, 2005) hal 54

<sup>40</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987) hal 22

<sup>41</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Rajawali Grapindo, Jakarta, 1995)

lembaga pengkaderan, ketua pemberdayaan urusan perempuan, dan pengurus partai khususnya perempuan.

#### 4). Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Wawancara

Teknik ini merupakan proses untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai dan terlibat secara langsung terhadap responden dengan sistematis serta berlandaskan pada tujuan penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara ini dikelompokkan sebagai data primer. Adapun objek yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah 4 orang sumber yakni Drs. Immawan Wahyudi M.Hum ketua DPW PAN D.I Yogyakarta (anggota dewan DPRD Propinsi D.I Yogyakarta), Isti'anah ZA, SH, M.Hum, wakil ketua pemberdayaan perempuan (anggota dewan DPRD Propinsi D.I Yogyakarta) Drs. M. Afnan Hadikusumo, wakil ketua perkaderan, (anggota dewan DPRD propinsi D.I Yogyakarta) Paryanto Rohma S.Ag wakil sekretaris perkaderan dan ditambah satu orang fungsionaris perempuan.

##### 2. Teknik Dokumentasi

Dengan teknik ini, penulis mengumpulkan data yang berasal buku-buku, arsip, website, dan catatan-catatan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data yang yang diperoleh dari dokumentasi ini di klasifikasikan ke dalam data sekunder.

#### 5). Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Sehingga analisa tersebut berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, dan informasi yang ada.

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan.

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden



3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> PROF. DR. Lexy J. Moleong, M.A, Metode Penelitian Kualitatif, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008) hal 9-10